

**KOMERSIALISASI PERNIKAHAN *SIRRĪ* DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus Praktik Perkawinan *SirrĪ* Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang  
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Salman Alfarisi  
NIM. C01211066**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Ahwal As Syakhsiyyah  
Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salman Alfarisi  
NIM : C01211066  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Ahwal As Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam  
Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa  
Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten  
Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



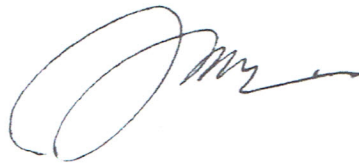
Salman Alfarisi  
NIM. C01211066

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Salman Alfarisi NIM. C01211066 dengan judul “KOMERSIALISASI PERNIKAHAN SIRRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,



**Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag**

**NIP. 195612201982031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salman Alfarisi NIM. C01211066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Perdata Islam.

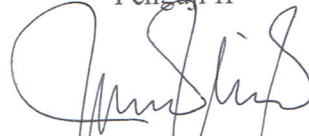
### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



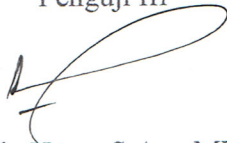
Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag  
NIP. 195612201982031003

Penguji II



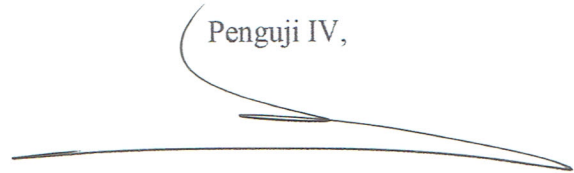
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag., MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI  
NUP. 201603306

Surabaya, 07 Agustus 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALMAN ALFAIRI  
NIM : C01211066  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
E-mail address : alfarisirev@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

*KOMERSIALISASI PERNIKAHAN SIRRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agusuts 2018

Penulis

(Salman alfarisi)

nama terang dan tanda tangan

















































tenteram dan bahagia.<sup>21</sup> Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah tidak sepakat dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak sejalan dengan misi menyebarkan ajaran Islam serta menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan insting dan akal.

Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun di dalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat- syarat tertentu,<sup>22</sup> diantaranya:

1. Calon Suami, dengan syarat: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Istri, dengan syarat: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan.
3. Wali Nikah, dengan syarat: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi Nikah, dengan syarat: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab- qabul* yang dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab Kabul, dengan syarat: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul

---

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No.i 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 40.

<sup>22</sup> Kama Rusdiana, Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 5-6.













Kabul yang diucapkan oleh masing-masing dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syarah, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal dan beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyariatkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut.

- b. Peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam. Fatwa tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara, sebab dalam fatwanya tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, namun hal ini tetap menganjurkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah











































menikahkan. Pelembagaan nikah *sirrī* dan kuantitas mahar ini berakibat semakin rendahnya status perempuan. Mereka dieksploitasi secara seksual juga dieksploitasi secara ekonomi oleh masyarakat setempat. Praktik nikah *sirrī* ini telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat, bahkan juga digandrungi oleh perempuan Desa Pekoren karena dapat menghasilkan pundi-pundi bagi mereka.

Semula praktik nikah *sirrī* ini hanya dilakukan oleh orang tertentu saja, kemudian hampir semua perempuan yang menjanda dan tidak mampu secara ekonomi melakukan praktik nikah *sirrī* ini. Kini praktik nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini juga mengeksploitasi gadis dengan usia minimal 15 tahun, tentunya atas persetujuan kedua orangtua dengan kondisi finansial yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

### **C. Mekanisme Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren**

Perkawinan *sirrī* yang berkembang di Desa Pekoren pada dasarnya memiliki cara yang hampir mirip dengan pernikahan pada umumnya, yaitu memilih istri, meminang, serta ijab kabul. Yang membedakan praktik nikah *sirrī* ini hanyalah prosedur transaksi yang dilakukan oleh peminat dan Kiai atau makelar. Peminat yang datang ke Desa Pekoren dan berniat mempersunting perempuan di wilayah tersebut harus sudah menyediakan *budget*. Semakin tinggi *budget* yang disediakan oleh peminat, semakin tinggi pula kualitas perempuan yang didapatkannya.





























Berdasarkan pengertian, rukun dan syarat jual beli, maka komersialisasi pernikahan *sirrī* seperti yang terang-terangan dilakukan di Desa Pekoren merupakan sesuatu yang tidak layak diperjualbelikan. Praktik Komersialisasi pernikahan *sirrī* merupakan suatu bentuk kritik terhadap jual beli yang tidak berada pada tempatnya. Memang dalam praktik ini terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, peminat dan kiai atau *broker*. Namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang disyari'atkan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam tidak sama sekali memiliki arti sebagai barang yang patut ditukar meski oleh apapun.

Dalam praktik nikah *sirrī* ini, *broker* atau makelar (yaitu Kiai dan Kaki tangannya) dapat dikategorikan dalam jual beli. Mereka menjual jasa untuk mencarikan istri bagi peminat yang menyepakati harga yang diberikan. Maka *broker* ini halal adanya dalam Hukum Islam.

## **B. Analisis Hukum Positif Terkait Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren**

### **1. Keabsahan Pernikahan *Sirrī***

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah *sirrī* merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo.

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat



penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Permasalahan masih banyaknya *nikah sirrī* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *pemerintah*. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan









pihak yaitu, peminat dan kiai atau *broker*. Namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang disyari'atkan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam tidak sama sekali memiliki arti sebagai barang yang patut ditukar meski oleh apapun. Dalam praktik nikah *sirrī* ini, *broker* atau makelar (yaitu Kiai dan Kaki tangannya) dapat dikategorikan dalam jual beli. Mereka menjual jasa untuk mencarikan istri bagi peminat yang menyepakati harga yang diberikan. Maka *broker* ini halal adanya dalam Hukum Islam. Namun tetap tidak dianjurkan menjalankan bisnis komersialisasi pernikahan *sirrī*.

3. Analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren ini tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu pencatatan perkawinan. Praktik komersialisasi nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini merupakan perdagangan yang tidak berbentuk benda atau barang, namun komersialisai nikah *sirrī* tersebut justru merupakan sebuah ajang prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama. Bukan merupakan perdagangan yang lazim ada di Indonesia. Pembahasan prostitusi ini jelas haram hukumnya dalam KUH Pidana. Akan tetapi penulis tidak akan membahas prostitusi terselubung dalam penelitian ini. Sedangkan cara kerja *broker* dalam praktik ini jelas diperbolehkan karena mereka hanya membantu menyalurkan lelaki yang meminati adat yang telah turun temurun ada di Desa Pekoren.





